

# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2019**



**BAGIAN PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
TAHUN 2018**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNya semata, akhirnya Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 ini dapat kami susun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 ini telah tercermin dalam Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 137 ayat 1 disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Dengan telah selesainya Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 ini, kami berharap dapat menjadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas operasional Bagian Pemerintahan SETDA Kota Probolinggo. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 ini, oleh karenanya kami sangat berterimakasih atas saran dan kritik yang ada demi perbaikan di masa mendatang.

Probolinggo, Oktober 2018

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN  
SETDA KOTA PROBOLINGGO

**Dra. INA LUSILINAWATI, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19671109 199403 2 005

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud & tujuan .....	2
1.4 Sistematika Penyusunan .....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN TAHUN 2017 .....	5
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN KEG THN 2019 .....	10
A. Visi dan Misi .....	10
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .....	11
C. Program, Kegiatan Tahun 2019 .....	15
BAB IV PENUTUP .....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), prioritas dan plafon Anggaran sementara penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2019. Disamping itu Rencana Kerja (Renja) merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi SKPD.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dibentuk secara resmi berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, PP Nomor 38 Tahun 2008, Perda Nomor 5 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2008, dimana secara yuridis sejak tanggal 18 Juli 2008 dengan diisinya personil sebagai motor penggerak implementasi kegiatan / operasional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat di bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, pemerintahan kecamatan dan kecamatan serta kerja sama pemerintahan daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan PP 8 Tahun 2008;
5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2009.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 bermaksud untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta inovasi – inovasi yang akan membawa Bagian Pemerintahan menuju yang lebih baik. Selain itu Rencana Kinerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Pemerintahan tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 adalah sebagai berikut

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun prioritas di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019.
- b) Sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019.
- c) Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2019.
- d) Mengevaluasi / mereview hasil kegiatan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo tahun sebelumnya.
- e) Mencari solusi/pemecahan masalah yang dihadapi pada tahun sebelumnya agar tidak terjadi di tahun yang akan datang .

## 1.4 Sistematika Penyusunan

Recana Kinerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan renja Bagian Pemerintahan Tahun 2019.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019

### 1.4 Sistematika penulisan

## BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bagian Pemerintahan Tahun 2017

Pada bagian ini dijelaskan mengenai program dan kegiatan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017

## BAB III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2019

Pada bagian ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan Rencana Kerja Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019

## BAB IV Penutup

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kesimpulan, saran dan harapan menuju penyusunan renja yang lebih baik

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

#### **BAGIAN PEMERINTAHAN TAHUN 2017**

Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan serta dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar dapat tercapainya tujuan organisasi dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan kantor Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas rutin kantor kedinasan Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam jangka waktu satu tahun anggaran melalui beberapa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan.
3. Rapat Koordinasi konsultasi keluar daerah.
4. Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor.

Pada program ini seluruh kegiatan dapat terealisasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

##### **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal pemeliharaan sarana dan prasarana, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
2. Pengadaan Mebeleur;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional;

5. Pemeliharaan Rutin Mebeleur;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi;
7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor.

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

### **3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Program kerja ini ditetapkan dengan maksud agar tujuan organisasi dapat tercapai khususnya dalam hal peningkatan disiplin aparatur, sehingga pelaksanaan tugas-tugas kedinasan dapat berjalan tertib dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan untuk 1 (satu) tahun anggaran. Pada program ini terdapat kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Olahraga
2. Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional.
3. Penyelenggaraan Peringatan dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

### **4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Kerja ini ditetapkan dengan maksud agar Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo memiliki sumber daya manusia yang bermutu (berkualitas), mampu bersaing dengan sumber daya lain, sehingga mampu meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusiannya.

1. Bimbingan teknis/ workshop / sosialisasi / seminar implementasi peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan Studi Banding/ Kunjungan Kerja

Dalam program ini terdapat kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

### **5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**



Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang keuangan yaitu meningkatkan dan mengembangkan sistem pelaporan keuangan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi keuangan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai keuangan Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4. Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD.

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

#### **6. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah**

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang administrasi yaitu meningkatkan kapasitas kinerja aparatur pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan demi tercapainya tertib administrasi pemerintahan, sehingga mempermudah dalam pencarian data mengenai administrasi Bagian Pemerintahan Setda Kota Probolinggo dalam 1 (satu) tahun anggaran, dengan target dan realisasi sasaran melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Profil SKPD.

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100% . Program dan kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan dilimpahkan oleh program dan kegiatan lainnya .

#### **7. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah**

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang kerjasama yaitu meningkatkan peran serta segala pihak dalam

berkontribusi dalam pembangunan. Hal ini dilakukan demi tercapainya program pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Dalam program ini terdapat kegiatan yaitu :

1. Fasilitas Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik
2. Penerimaan Kunjungan Kerja dari Daerah Lain
3. Penyelenggaraan APEKSI

Kerjasama antar Pemerintahan Daerah, dan dengan pihak swasta dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 103,4%.

#### **8. Program Pemantapan Otonomi Kota**

Program ini ditetapkan untuk dapat tercapainya tujuan organisasi dalam bidang otonomi daerah yaitu meningkatkan implementasi otonomi daerah pada Kota Probolinggo. Hal ini dilakukan demi tercapainya implementasi Pelaksanaan Otonomi Kota yang lebih baik, melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Pemerintahan Kelurahan.
2. Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Pemantapan Implementasi Kewenangan.
4. Penamaan dan Pembakuan Rupa Bumi
5. Pembinaan PATEN Tingkat Kota
6. Evaluasi Perkembangan Kelurahan
7. Updating Profil Kelurahan
8. Pelaksanaan PIN Desa/Kelurahan
9. Fasilitasi / Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Seluruh kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Evaluasi Pelaksanaan Renja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan pada tahun 2017 seperti pada terlihat pada Tabel 2.1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu	100%	100%	100%	Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	145.223.000,-	118.717.400,-	81,75
						Pemantapan Implementasi Kewenangan	69.000.000,-	56.639.500,-	82,09
						Penamaan dan Pembakuan Rupa Bumi	52.875.000,-	50.846.300,-	96,16
						Penataan Batas Daerah			
		2. Prosentase Kecamatan berkinerja baik	60%	60%	109 %	Pembinaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tingkat Kota	75.000.000,-	55.889.100,-	74,52
						Penyegaran dan Pemantapan Manajemen Kelurahan.	158.337.500,-	134.159.300,-	84,73

						Evaluasi Perkembangan Kelurahan	81.968.900,-	81.968.900,-	100
						Up DATING Profil Kelurahan	125.932.000,-	74.212.500,-	58,93
						Fasilitasi/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	60.000.000,-	21.304.700,-	35,51
2.	Meningkatnya implementasi Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri	1. Prosentase naskah kerja sama aktif yang diimplementasikan	80%	88,24%	103,4%	Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik	103.100.000,-	94.514.870,-	91,67
						Penerimaan kunjungan kerja dari daerah lain	0	0	0
						Penyelenggaraan APEKSI	151.500.000,-	113.847.000,-	75,15

## BAB III

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

#### A. VISI DAN MISI

Di era globalisasi dan reformasi sekarang ini sangat dituntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan yang telah digariskan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasionalnya. Tingkat tuntutan dan harapan serta apresiasi masyarakat yang terus berkembang terhadap segala bentuk kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah menunjukkan bahwa masyarakat selaku subyek pembangunan telah berkembang dewasa dan semakin kritis. Perubahan yang demikian cepat dan beragam ini apabila tidak kita cermati dengan bijak akan membuat kita semakin sulit untuk dapat memprediksi perubahan-perubahan berikutnya yang akan terjadi.

Semua orang ingin dengan mudah memperoleh informasi yang dikehendaki. Untuk itu bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota berusaha bertindak secara profesional, dalam arti mampu menjabarkan dan melaksanakan tugas dengan tepat dan cepat sehingga mencapai tujuannya.

Bagian Pemerintahan Sekretariat Kota Probolinggo menentukan visinya sebagai berikut :

**"MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM  
YANG EFEKTIF DAN EFISIEN"**

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan maka Bagian Pemerintahan perlu menetapkan misinya secara jelas. Sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa organisasi pada satu fokus yang dapat memberi penjelasan tentang keberadaan komunikasi atau kegiatan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya.

#### **MISI**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan isi yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan makna misi tersebut maka Bagian Pemerintahan merumuskan pernyataan misinya sebagai berikut :

“TERCIPTANYA PROFESIONALISME PERANGKAT KECAMATAN DAN KELURAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT MENUJU KE PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*).”

## B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan mewujudkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Dalam kerangka perencanaan strategik tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan Misi Bagian Pemerintahan maka penjabarannya ke dalam tujuan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum yang efektif dan efisien.”**

### ➤ Sasaran Dan Indikator

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Bagian Pemerintahan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang ditetapkan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Indikator sasaran :

- Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD tepat waktu
- Prosentase Kecamatan Berkinerja Baik
- Prosentase kerjasama yang diimplementasikan

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Tahun 2019	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1	2	3	4	5
1.	Prosentase OPD yang menyampaikan	100 %	100 %	100 %

	LPPD tepat waktu			
2.	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	45 %	65 %	65 %
3.	Prosentase Kerjasama yang diimplementasikan	50 %	80%	80 %

### **C. Program Dan Kegiatan Tahun 2019**

Berdasarkan kebijaksanaan organisasi yang telah ditetapkan maka Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo merumuskan Program sebagai berikut:

#### **1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1.20.03.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.20.03.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 1.20.03.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 1.20.03.01.27 Penunjang administrasi dan operasional rutin kantor/kedinasan

#### **1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- 1.20.03.02.13 Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
- 1.20.03.02.22 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- 1.20.03.02.23 Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
- 1.20.03.02.24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
- 1.20.03.02.32 Pemeliharaan rutin / berkala alat kantor, alat rumah tangga, alat studio dan alat komunikasi
- 1.20.03.02.61 Pengelolaan Barang Milik Daerah

#### **1.20.03.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1.20.03.03.09 Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar Nasional
- 1.20.03.03.11 Penyelenggaraan peringatan dan hari jadi Provinsi Jawa Timur
  
- 1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
- 1.20.03.05.04 Bimbingan Teknis / workshop / sosialisasi / seminar implementasi Peraturan Perundang-Undangan
  
- 1.20.03.07 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
- 1.20.03.07.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- 1.20.03.07.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 1.20.03.07.07 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
  
- 1.20.3.10 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah**
- 1.20.3.10.12 Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  
- 1.20.03.11 Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah**
- 1.20.03.11.01 Fasilitasi/Pembentukan Kerja Sama antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan Publik
- 1.20.03.11.06 Penyelenggaraan APEKSI
  
- 1.20.03.12 Program Pemantapan Otonomi Kota**
- 1.20.03.12.32 Pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan
- 1.20.03.12.34 Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 1.20.03.12.35 Pemantapan Implementasi Kewenangan
- 1.20.03.12.37 Penataan Batas Daerah



- 1.20.03.12.49 Penamaan dan Pembakuan Rupa Bumi
- 1.20.03.15.51 Pembinaan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ) Tingkat Kota
- 1.20.03.15.52 Evaluasi Perkembangan Kelurahan
- 1.20.03.15.53 Updating Profil Kelurahan
- 1.20.03.15.58 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat

No	Sasaran	Indikator	Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4		5
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu	<b>Program Pemantapan Otonomi Kota</b>		830.409.440,00
			Pelaporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	197.471.000,00
			Pemantapan Implementasi Kewenangan	1 Kegiatan	20.770.000,00
			Penataan Batas Daerah	1 Kegiatan	71.375.000,00
			Penamaan Dan Pembakuan Rupa Bumi	1 Kegiatan	42.600.000,00
		Prosentase Kecamatan berkinerja baik	Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	4 Kegiatan	228.537.500,00
			Pembinaan Paten (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) Tingkat Kota	2 Kegiatan	69.400.000,00
			Evaluasi Perkembangan Kelurahan	65 Kegiatan	91.400.000,00
			Updating Profil Kelurahan	1 Dokumen	46.200.000,00

			Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	2 Kegiatan	62.655.940,00
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase naskah kerja sama aktif yang diimplementasikan	<b>Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah</b>		322.200.000,00
			Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik	60 Jenis Kerjasama	60.400.000,00
			Penyelenggaraan Apeksi	1 Kegiatan	261.800.000,00
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Prosentase OPD yang menyampaikan LPPD Tepat Waktu	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		370.276.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	17.400.000,00
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	8.300.000,00
			Rapat-Rapat Kordinasi, Konsultasi Dalam Daerah	12 Bulan	150.000.000,00
			Penunjang Administrasi Dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan	12 Bulan	194.576.000,00
			<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>		225.329.278,00

			Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio Dan Alat Komunikasi	12 Bulan	44.729.278,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Kegiatan	75.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	1 Tahun	33.000.000,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	2.600.000,00
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio Dan Alat Komunikasi	12 Bulan	45.000.000,00
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan	25.000.000,00
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		59.700.000,00
			Penyelenggaraan Peringatan Dan Upacara Hari-Hari Besar Nasional	1 Kegiatan	9.700.000,00
			Penyelenggaraan Peringatan Dan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur	1 Kegiatan	50.000.000,00
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		38.000.000,00

			Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/Seminar Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1 Kegiatan	38.000.000,00
			<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>		13.000.000,00
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	1 Dokumen	4.000.000,00
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	4.000.000,00
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dan Rapbd Skpd	1 Dokumen	5.000.000,00
			<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah</b>		215.000.000,00
			Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	1 Kegiatan	215.000.000,00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan landasan fundamental dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD. Selain itu Renja Rencana Kinerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 merupakan pengendali dan pengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Pemerintahan tahun lalu dan sebagai acuan untuk kegiatan yang akan datang

Undang-undang jangka Panjang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan rencana pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Bagian Pemerintahan Sekretariat daerah Kota Probolinggo harus selalu menjaga kualitas kinerja, karena hal tersebut akan terkait langsung dengan kualitas sumber daya manusia aparatur Pemerintah di Kota Probolinggo. Dengan terselesainya Rencana Kerja (RENJA) Bagian Pemerintahan Tahun 2019 ini semoga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Probolinggo.